

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL (Analisis Struktur Fungsi)

Muh. Zakaria*

Abstrak: Pendidikan unggul dan inovatif merupakan cita-cita yang diharapkan dalam pendidikan nasional. Maka dalam tulisan ini mencoba memberikan analisis kritis dalam menjawab tantangan tersebut, misalkan dalam menjalankan Prinsip pelaksanaan kurikulum disetiap satuan pendidikan menggunakan: Pertama, kurikulum didasarkan pada potensi; Kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Ketiga, pelaksanaan kurikulum memberikan pelayanan yang bersifat perbaikan sesuai dengan potensi. Keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan saling menerima dan menghargai. Kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Keenam kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah. Ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponenn mata pelajaran dan pengembangan diri.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Nasional, Struktur Fungsi.

Undang-undang pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global (*UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.).

* Penulis adalah dosen di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur. Email: muhammadzakaria@jaihnwpancor.ac.id

Sebagaimana yang telah kita ketahui sistem pendidikan kita masih dalam taraf pembangunan dan melakukan inovasi menuju perbaikan mutu pendidikan, berbagai macam upaya digalakkan mulai dari sistem, struktur, hingga perbaikan kurikulum. Namun perubahan dan pengembangan yang dilakukan para pakar pendidikan tersebut belum menyentuh apa yang jadi permasalahan pada masyarakat sekolah kita. Yang menjadi buah bibir permasalahan dewasa ini terletak pada masalah pemerataan pendidikan.

Wacana pengembangan tersebut masih pada tataran akademis pendidikan sebagian besarnya belum tersentuh oleh kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia. Terlihat dengan beberapa kali pergantian menteri pendidikan kebijakan yang ditetapkan masih mengada-ada alias hanya tampil beda dengan kebijakan menteri sebelumnya, kenapa demikian karena kurangnya profesional tenaga pendidika yang menjawai pendidikan itu. Disamping itu juga banyaknya kepentingan pribadi yang mengendarai pendidikan sebagai objek yang menguntungkan bagi mereka yang memeras dan menggadaikan kecerdasan bangsa ini. Kerakusan para pejabat membuat kepentingan tersebut menghancurkan tujuan pendidikan sebenarnya (Mu'arif 2008, 133).

Contoh rill ketika terpilihnya bambang sudibyo sebagai mentri pendidikan, dimana kebijakan tersebut memberikan hak otonom pada masing-masing lebaga pendidikan yang dikenal dengan kebijakan swastanisasi pendidikan, ini mencerminkan sistem kapitalisasi dalam dunia pendidikan sangat terlihat kebijakan yang dibuat tidak memberikan solusi malah menambah daftar permasalahan dalam dunia pendidikan ini, dimana pendidikan tidak bisa dinikmati dalam kalangan bawah, disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan. bagaimana tidak kebijakan sebelumnya saja belum selesai muncul kebijakan baru yang tidak jelas pangkal ujungnya, sehingga berdirinya sekolah yang bertarap internasional, lagi-lagi kebijakan ini memberatkan masyarakat bawah yang tidak bisa menikmati pendidikan layak (Mu'arif 2008, 133).

Pendidikan mutu yang dijanjikan mentri dan fungsionalis pendidikan belum memperlihatkan hasil yang memuaskan,

meningkatkan mutu katanya? Namun sebaliknya, permasalahan pemerataan pendidikan, perbaikan kurikulum, dan mutu dalam pendidikan belum terjawab sampai saat ini, maka dalam hal permasalahan ini penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan struktur fungsi dalam melihat standar dan struktur kurikulum pendidikan.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan

Perubahan kurikulum pendidikan nasional terus diupayakan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi dasar dalam pembelajaran, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) hingga kurikulum tingkat satuan pembelajaran, tidak luput perguruan tinggi ikut menyiapkan konsep pengembangan kurikulum tersebut. Peningkatan mutu jadi tujuan utama dalam pengembangan dan perubahan kurikulum itu, namun hal demikian masih belum terealisasi secara maksimal dilapangan dimana pembelajaran di sekolah, selama cenderung teoritis dan tidak terkait dengan lingkungan dimana anak berada. Akibatnya peserta didik tidak mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah dalam kesehariannya (Muhamimin 2010, 147).

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari kelompok mata pelajaran, dimana kelompok tersebut adalah mata pelajaran agama; mata pelajaran kewarganegaraan; pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; pelajaran estetika; mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan (Hidayat dan Machali 2010, 193).

Pada point pertama kelompok mata pelajaran agama ditujukan guna memberi akhlak mulia berbudi pekerti hematnya manjadikan manusia yang bermoral, berilmu dan bermartabat, namun kendalanya pengelolaan pendidikan kelihatan masih belum mencerminkan hal tersebut, dimana dalam pendidikan memanusiakan manusia seperti contoh, kenakalan remaja, pemakaian narkoba ditingkat remaja, pemerkosaan, aborsi dan

sebagainya, dalam mata pelajaran agama yang ditetapkan pemerintah masih dalam tataran teori namun dalam pengaplikasiannya di lingkukan sekolah (mendidik peserta didik) masih belum terealisasiakan. Selanjutnya pada kelompok-kelompok mata pelajaran lainnya, jika dicermati kesemunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang utuh, pengembangan kemampuan siswa dalam berbagai bidaang keilmuan, potensi fisik, membudayakan sikap sportif, disiplin, berfikir ilmiah, dan mampu menciptakan keharmonisan bermasyarakat.

Prinsip pelaksanaan kurikulum disetiap satuan pendidikan menggunakan prinsip sebagai berikut: *Pertama*, kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya; *Kedua*, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar yaitu: belajar untuk beriman dan bertakwa kepada tuhan, menghayati, mampu berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar membangun kepercayaan diri melalui pembelajaran efektif kreatif, aktif, dan menyenangkan. *Ketiga*, pelaksanaan kurikulum memberikan pelayanan yang bersifat perbaikan sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik. *Keempat*, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dengan pendidik yang saling menerima dan menghargai. *Kelima*, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia dengan pemanfaatan alam sekitar. *Keenam* kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. *Ketujuh*, kurikulum yang mencakup seluruh komponenn mata pelajaran dan pengembangan diri dalam keseimbangan antar jenjang pendidikan (Hidayat dan Machali 2010, 195–196).

Sebagaimana yang dibahas di atas lebih lanjut mengenai struktur kurikulum dalam pendidikan. Sturktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik

dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam setiap satuan pendidikan dituangkan kopentensi yang harus dikuasai sesuai dengan beban belajar yang terbentuk dalam struktur kurikulum. Yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah terdiri dari kompetensi dasar dan dasar kompetensi yang dikembangkan berdasarkan kompetensi kelulusan. Sebagai contoh struktur kurikulum tersebut dapat dilihat pada struktur kurikulum SD/MI, MTs/SMP, dan SMA/MA. Dimana masing-masing jenjang satuan pendidikan memiliki mata pelajaran yang harus dituntaskan berdasarkan standar lulus. Masing-masing dari jenjang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Struktur kurikulum SD/MI memuat delapan mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri yang ditempuh dalam kurun waktu enam tahun, Seperti, pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa indonesia, matematika, IPA, IPS, SBK, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. SMP/MTs dan SMA/MA hanya tiga tahun. Jelasnya struktur kurikulum masing-masing jenjang memiliki kesamaan mata pelajaran dimana jenjang SMP/MTs ditambah dua mata pelajaran menjadi sepuluh mata pelajaran yang wajib dituntaskan, seperti, bahasa Inggris dan keterampilan atau teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan jenjang SMA/MA ditambah enam mata pelajaran menjadi “enam belas” (sesuai dengan jurusan yang diambil, IPA, IPS dan Bahasa) mata pelajaran yang wajib dituntaskan sesuai dengan jurusan yang diambil, seperti, ekonomi, fisika, biologi, geografi kimia, dan sosiologi. Mengenai tambahan mata pelajaran dimasing-masing jenjang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan yang ditempuh. Sedangkan pengembangan diri merupakan mata pelajaran bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik tersebut. Dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan tematik (Hidayat dan Machali 2010, 196–205).

Pemerataan Kurikulum Pendidikan

Dimaksukan dengan pemerataan kurikulum, apakah kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional itu benar-benar bisa memberikan mutu dan sarana pendukung disetiap sekolah yang ada di Indonesia baik di kota maupun di desa, kenyataannya pendidikan yang ada di kota jauh lebih baik dan diperhatikan ketimbang sekolah (lembaga pendidikan) ada di desa. Mulai dari sarana dan prasarana baik fisik sekolah, tenaga pengajar, serta setudi banding untuk kepala sekolah yang di desa masih jarang dilakukan. Jika hal demikian sudah terealisakan dilapangan kurikulum standar nasional mungkin akan mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Kemudian permasalah yang sudah lama muncul, bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang masih terlihat dualisme, antara departemen Agma dengan Diknas jauh berbeda, ada yang hak otonomi daerah dan satunya lagi masih dalam desentralisasi pemerintah pusat. Sejalan dengan hal tersebut dalam perbaikan mutu pendidikan dilakukan pula perbaikan kurikulum baik dari segi isi maupun pendekatannya, dari segi isinya, kebijakan kurikulum diserahkan pada lembaga pendidikan masing-masing. Pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan patokan umum. Seperti pada jenjang strata 1 harus mencapai 114 sampai 160 sks dan disetiap SKS ditentukan pula jumlah waktu yang harus dipenuhi (Nata 2009, 312).

Persoalan kurikulum tidak hanya persoalan teknis, karena dalam kurikulum pendidikan tersembunyi ide serta nilai yang sebenarnya dipaksakan oleh masyarakat dalam sistem pendidikan. Kurikulum tidak memenuhi tuntutan, melainkan tunduk kepada ideologi kaum elit yang hanya memuaskan kelompoknya, perubahan kurikulum biasanya tidak terlepas dari penguasa dan hegemoni yang terjadi disaat kurikulum itu lahir. Hal ini dinamakan *hidden currikulum* dimana kurikulum yang berlalu ditentukan oleh birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golongan elit (Dwiningrum 2011, 127). Sejalan dengan hal tersebut kurikulum pendidikan tidak terlepas dari politik pendidikan nasional. Rigidisasi Birokrasi pendidikan nasional pada dasarnya pengalaman baru bagi

pendidikan Indonesia, kemudian menjadi hegemoni birokrasi yang kaku dan sentralistik. Dilema antara kualitas dan kuantitas pada titik ini sangatlah jelas bahwa pengembangan tersebut ditujukan untuk pemerataan pendidikan, menyikapi anggaran pemerintah yang sangat terbatas (Dawan 2007, 205).

Sesuai dengan hal di atas materi pendidikan dan pendidikan islam tergambar dalam kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikannya dengan desain memerhatikan perkembangan masyarakat sekitarnya. Untuk itu dalam kurikulum terdapat kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap dan nilai pribadi yang integral sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berbagai upaya dilakukan hingga pembentukan undang-undang untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan nasional, walaupun belum dapat dirasakan hasilnya (Sanaky 2003, 158). Berdasarkan hasil laporan Unesco bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, sehingga peningkatan mutu menjadi sasaran perubahan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional. Didalam standar tersebut ditetapkan aturan dan patokan baku yang harus dicapai dalam kegiatan pendidikan. Patokan standar ini dilakukan oleh sebuah institusi yang kredibel dan independen yaitu badan Akreditasi Nasional sekolah dan Madrasah, kemudian dapat diukur dengan menggunakan nilai (Nata 2009, 310–311).

Namun demikian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan penetapan standar nasional, kita jangan membuat suatu konsep bahwa pendidikan nasional menjadi satu-satunya tujuan dalam pendidikan dan menempatkannya menjadi ukuran kesuksesan lembaga pendidikan kita, kemudian seluruh upaya diarahkan kepada standar nasional tersebut tanpa melakukan usaha-usaha yang konkret untuk mencapainya. Yang perlu diprioritaskan ialah pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang *besic* untuk semua rakyat. Dengan pemetaan seluruh masalah pendidikan barulah dirumuskan peningkatan satandard mutu dan pemerataan kualitas. Seperti halnya pemerataan mutu pendidikan, sekolah-

sekolah yang bermutu baik semakin lama bertambah makin baik, dan sekolah bermutu rendah diabaikan tanpa ada upaya bantuan yang memadai, sehingga ketimpangan ini semakin lama semakin jauh dari standar mutu tersebut (Tilaar 2002, 373).

Sehingga akan semakin jauh dari nilai pendidikan, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Attas dalam pengembangan masyarakat “pendidikan” mengatakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah melahirkan manusia yang baik, kami tidak bermaksud melahirkan masyarakat yang baik, karena masyarakat terdiri dari individu, melahirkan seseorang akan melahirkan masyarakat yang baik. Pendidikan adalah pembuat struktur masrakat. Jelasnya pemeratan pendidikan haruslah dilakukan secara sadar akan individualitasnya dan hubungan yang tepat antara masrakat, alam dan sebagainya (Wan Daud 2003, 189).

Catatan Akhir

Problem pendidikan indonesia sangalah kompleks, peningkatan mutu dengan perubahan berbagai standar kelulusan dan standar kompetensi hingga kurikulum pun dilakukan. Kebijakan pendidikan yang dibuatnya masih belum memmberikan dampak yang memuaskan. Penulis ingin memberikan saran dan masukan sebagai bentuk sumbangan pemikiran yakni, pemerintah hendaknya berknentrasi pada pemerataan dan akses pendidikan yang berkualitas untuk segenap masyarakat. Pemerataan ini diwujudkan dengan peningkatan kualitas sekolah merata diseluruh wilayah Indonesia dengan memurahkan biaya pendidikan, sehingga masyarakat bisa menikmati secara merata.

Daftar Pustaka

- Dawan, Anurrofiq. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahma.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hidayat, Ara, dan Imam Machali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan, Konsep Perinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Educa.
- Mu'arif. 2008. *Liberalisasi Pendidikan, Menggadaiakan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta: Pinus.
- Muhaimin. 2010. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa Press.
- Nata, Abuddin. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner (Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. n.d.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2003. *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Diterjemahkan oleh Hamid Famy, M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel. Bandung: Mizan.